

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, UUD Tahun 1945.

Indonesia, *Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir secara Elektronik*, Perka BAPETEN No. 5 Tahun 2018.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, UU No. 12 Tahun 2011.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Penanaman Modal*, UU No. 25 Tahun 2007.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, UU No. 20 Tahun 2008.

Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau disebut juga Burgerlijk Wetboek*.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*, PP No. 24 Tahun 2018.

Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha*, Perpres No. 91 Tahun 2017.

Indonesia, *Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik*, Perka BKPM No. 14 Tahun 2009.

Indonesia, *Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal*, Perka BKPM No. 6 Tahun 2018.

Indonesia, *Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan Pada Direktorat Lalu Lintas Barang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam*, UU No. 10 Tahun 2018.

BUKU

HS, Salim dan Budi Sutrisno. *Hukum Investasi Di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.

- Sembiring, Sentosa. *Hukum Investasi: Pembahasan Dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2018
- Ridwan. " *Hukum Administrasi Negara*". Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006.
- Sutedi, Andrian. "*Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*". Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Irianto, Sulistyowati dan Shidarta. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.*
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Efendi, Joenadi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Amirudin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006.

INTERNET

- “Sistem OSS Diluncurkan, Izin Berusaha Kini Lebih Mudah”, diakses <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b433407c8d81/sistem-oss-diluncurkan--izin-berusaha-kini-lebih-mudah>, diunduh pada tanggal 05 Januari 2019.
- “Pengusaha Tidak Taat Pajak Tak Bisa Daftar OSS”, diakses <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180809192346-532-321011/pengusaha-tidak-taat-pajak-tak-bisa-daftar-oss>, diunduh tanggal 02 Maret 2019.
- “Jenis Formulir SPT Tahunan”, diakses <https://www.online-pajak.com/>, diunduh tanggal 02 Maret 2019.
- “Cegah Korupsi Izin Usaha, KSP: Syarat SKDU akan Dihapus”, diakses <https://news.detik.com/berita/4215657/cegah-korupsi-izin-usaha-ksp-syarat-skdu-akan-dihapus>, diunduh pada tanggal 20 April 2019.
- “PTSP DKI Hapus Pengurusan SKDP dan SKDU”, diakses <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cd3fed24a77d/ptsp-dki-hapus-pengurusan-skdp-dan-skdu/>, diunduh pada tanggal 08 Juni 2019.

“Upaya DKI Integrasikan Perizinan Online JakeVO dan OSS Agar Tak Tumpang Tindih”, diakses <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/03/15/09025791/upaya-dki-integrasikan-perizinan-online-jakevo-dan-oss-agar-tak-tumpang?page=all>, diunduh pada tanggal 07 Juli 2019.

“Alur Layanan Investasi 3 Jam”, diakses https://www.bkpm.go.id/images/uploads/prosedur_investasi/file_upload/NEW-3-JAM-1.pdf, diunduh pada tanggal 17 Mei 2019.

“Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS untuk Pelaku Usaha”, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia (Versi 1.5), Juli 2018.

MAKALAH

Basah, Sjachran. “Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administasi.” Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995.